



JUDICIAL SYSTEM MONITORING PROGRAMME PROGRAMA DE MONITORIZAÇÃO DO SISTEMA JUDICIAL

PRESS RELEASE

Periode : Juli 2009

Edisi : Juli 2009

Persidangan Perdana atas Kasus Penyerangan 11 Februari 2008; Suatu Langkah Positif Sekaligus Tantangan Dalam Sektor Peradilan Timor Leste

Kasus penyerangan terpisah oleh kelompok mantan komandan Polisi Militer, almarhum Mayor Alfredo Reinado terhadap kediaman Presiden Ramos Horta dan PM Xanana Gusmão pada tanggal 11 Februari 2008 mulai disidangkan. Kasus yang mengemparkan publik Timor Leste dan populer dengan sebutan “*Peyerangan 11 Februari*” atau “Atentadu 11 de Fevereiru” itu sempat melukai Presiden Ramos Horta yang kemudian dirumahsakitkan di salah satu rumah sakit ternama di Australia selama kurang lebih tiga bulan. Penyerangan yang kemudian menewaskan Mayor Alfreido Alves Reinado yang diduga selaku pimpinan kelompok penyerangan dan salah satu anak buahnya itu mulai disidangkan pertama kali pada tanggal 13/7/09 di Pengadilan Distrik Dili setelah melalui proses investigasi selama satu tahun lebih.

Preoses persidangan perdana ini diawali dengan pembacaan dakwaan oleh hakim panel yang diketuai oleh Hakim Constancio Basmery, SH dan didampingi oleh dua orang hakim anggota lain.

Hadir dalam persidangan tersebut adalah para terdakwa yang terdiri dari dua puluh delapan (28) orang. Dari ke- 28 terdakwa tersebut satu diantaranya adalah perempuan berinisial AP. Terdakwa AP dalam kasus ini menjadi perhatian utama baik dari media nasional maupun internasional. Perhatian media terhadap terdakwa karena sebagaimana diberitakan bahwa terdakwa mempunyai hubungan khusus dengan almarhum Alfredo Reinado selama persembunyiannya di beberapa wilayah bagian barat dan selatan seperti Ermera, Aileu, Same, Suai dan tempat lainnya, setelah almarhum melarikan diri tahanan sementara di penjara Becora.. Terdakwa AP juga dituduh secara langsung oleh Presiden Ramos Horta selaku korban penyerangan dan menyebut AP selaku otak dari penyerangan tersebut. Hal lain yang menarik adalah bahwa terdakwa berbikewarganeraan (atau memegang dua passport; Timor Leste dan Australia) sehingga menghadirkan pengacara yang ditunjuk pemerintah Australia untuk membela kepentingan hukum warganya.

Kendatipun kasus ini menjadi perhatian publik baik dalam maupun luar negeri, namun tidak seperti yang diharapkan oleh banyak kalangan bahwa para terdakwa akan memberikan informasi yang jelas, detail dan akurat untuk pengadilan. Dengan demikian pengadilan dapat mengungkap dan membongkar motif penyerangan yang masih menjadi misteri dan menjawab kebingungan publik atas kebenaran substansial dari peristiwa berdarah itu. Peristiwa yang hingga detik ini masih simpan siur, kontraversial dan terkesan dipolitisir. Publik Timor Leste pada umumnya masih bertanya apakah kasus ini murni sebuah penyerangan yang dilandasi oleh tekanan psikologis dan rasa frustrasi dari

Alfreido Reinado dan kelompoknya karena tidak adanya komitmen politik dari para elit untuk menyelesaikan kasusnya dan krisis berkepanjangan yang melanda negeri ini atautkah kasus ini menyimpan alasan lain dibalik peristiwa tersebut.

Namun sayangnya para terdakwa yang dihadirkan oleh pengadilan pada persidangan tersebut memilih diam. Tidak satu pun diantara mereka yang memberikan tanggapan atau paling tidak menolak dakwaan Jaksa Penuntut Umum mengenai keterlibatan mereka dalam kasus penyerangan di dua tempat terpisah terhadap Presiden Ramos Horta di kediamannya, Metiaut dan PM Xanana di Laulara, Dare, sekitar 10 Km dari kota Dili. Hanya terdakwa GS yang sempat memberikan tanggapan singkat atas dakwaan yang dibacakan dan mengatakan bahwa dakwaan tersebut tidak benar. Namun kemudian ketika hakim memintanya untuk memberikan keterangan lebih lanjut atas penolakan dakwaan jaksa penuntut umum, terdakwa memilih diam. Terdakwa tidak melanjutkan penolakannya dengan mengacu kepada haknya selaku terdakwa untuk diam sebagaimana diatur dalam Hukum Acara pidana Timor Leste.

Secara hukum terdakwa atau siapapun yang dihadirkan dalam sebuah persidangan dimungkinkan untuk diam atau tidak menjawab pertanyaan pengadilan. Hal itu disampaikan oleh hakim sebelum proses persidangan dimulai. Namun untuk kasus-kasus setingkat dan sekompleks "Penyerangan 11 Februari, idealnya para terdakwa diharapkan untuk berbicara dan menyediakan keterangan yang cukup untuk pengadilan. Karena selain untuk kepentingan penilaian pengadilan kerjasama ini dimaksudkan untuk pengungkapan kebenaran substansial dari sebuah tindak pidana. Keterangan terdakwa juga merupakan elemen lain dari alat bukti yang diperlukan pengadilan untuk saling dipertentangkan dan menguji satu sama lain. Dengan demikian sepantasnya para terdakwa memberikan tanggapan dan penjelasan agar kemudian pengadilan dapat mempertimbangkannya sebelum menghubungkan dengan bukti-bukti lainnya.

Di lain pihak dakwaan yang disampaikan oleh para jaksa penuntut umum bahwa para terdakwa dikenai dakwaan berlapis atas tindak pidana perencanaan atas percobaan pembunuhan, pengrusakan, dan persengkongkol/konspirasi. Pasal-pasal dakwaan tersebut semuanya diancam dengan hukuman antara 4-20 tahun penjara. Namun para terdakwa tidak satupun yang menggunakan haknya untuk menolak dakwaan yang memberatkan itu.

Berbagai pihak yang selama ini menunggu dan berharap bahwa pada saatnya para terdakwa akan memberikan dan mengungkapkan kebenaran sesungguhnya mengenai motif dan alasan yang melatarbelakangi terjadinya peristiwa 11 Februari 2008 satu tahun silam belum terjawab . Publik hanya berharap kepada pengadilan untuk lebih aktif dan kreatif dalam proses ini agar setidaknya dapat menemukan indikasi-indikasi yang mendekati kebenaran sebelum mengambil putusan termasuk saksi lain dan para korban.

Karena tidak satupun dari terdakwa yang mau memberikan keterangannya, maka hakim langsung mempersilahkan saksi Domingos Pereira untuk menyampaikan kesaksiannya. Pada kesempatan itu saksi mengatakan bahwa, dirinya disergap oleh beberapa anggota kelompok Alfredo sehingga menyerahkan senjatanya. Namun mengenai siapa yang

menembak Alfredo berikut anak buahnya dan Presiden, saksi menerangkan bahwa dirinya tidak tahu persis.

Dalam keterangannya saksi menerangkan bahwa saksi kenal baik para terdakwa yang menyerang dirinya pada waktu itu karena sebelumnya mereka merupakan sesama anggota F-FDTL di Lospalos, Baucau dan Metinaro.

Sementara itu, karena keawatiran kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan, maka hampir disemua sudut di sekitar wilayah gedung Pengadilan Distrik Dili dijaga ketat oleh aparat keamanan baik dari UNPOL (GNR) maupun PNTL dan F-FDTL. Para anggota pengamanan ini dilengkapi dengan senjata laras panjang. Walaupun Pengadilan setempat telah mengeluarkan pengumuman untuk tidak mengizinkan pengamanan dengan senjata karena secara psikologis dapat mempengaruhi para terdakwa untuk secara leluasa dan bebas memberikan keterangannya di pengadilan. Namun pengamanan ini tetap dilakukan sebelum, selama dan setelah proses persidangan berlangsung. Para pengunjuk dan pihak lain termasuk wartawan, keluarga para terdakwa, simpatisan dan teman-teman terdakwa semua diperiksa satu per satu dengan alat pendeteksi (detector) dari GNR

Kasus ini diperkirakan akan diproses selama kurang lebih satu bulan hingga akhir bulan Agustus mendatang. Tenggang waktu tersebut diperlukan karena banyaknya saksi yang akan memberikan keterangan mereka terkait kasus ini. Dipastikan sekitar 173 orang saksi yang akan memberikan keterangan termasuk Presiden Ramos Horta dan Perdana Menteri Xanana Gusmao selaku korban dalam insiden ini., Karena kedua terdFTAR dalam daftar saksi yang diajukan oleh pihak jaksa penuntut umum.

Mencermati dan memahami kompleksitas dan pentingnya kasus tersebut dalam sistem peradilan Timor Leste, JSMP mendorong dan mendesak para terdakwa untuk bekerjasama dengan pengadilan dengan memberikan informasi yang memadai dan layak ketika pengadilan meminta untuk melakukan hal itu. Walaupun JSMP memahami hak para terdakwa untuk diam adalah haknya selaku terdakwa, namun untuk kepentingan yang lebih mulia dari itu yakni demi pengungkapan kebenaran dan keadilan untuk masa depan negeri ini, para terdakwa seharusnya diharapkan untuk lebih kolaboratif. Pentingnya kerjasama para pihak termasuk para terdakwa untuk mengungkap fakta-fakta yang tersembunyi dalam kasus tersebut. JSMP juga mengajak sekaligus menghimbau kepada segenap komponen bangsa termasuk di dalamnya para petinggi Negara agar memberikan keleluasaan terhadap pengadilan untuk menjalankan fungsinya selaku lembaga peradilan yang independen dan jauh dari pengaruh dan tekanan apapun. Karena hanya dengan cara itulah kita mulai belajar untuk membangun Negara dalam kerangka sebuah Negara hukum yang berdaulat dan menempatkan hukum dan konstitusi di atas segala kepentingan lainnya. JSMP menilai kehadiran militer dan pengamanan super ketat dengan peralatan senjata berat dalam sebuah proses hukum di pengadilan merupakan cerminan pencederaian dan penodaan terhadap integritas institusi hukum dan pengingkaran terhadap prinsip-prinsip peradilan yang bebas, imparial dan jauh dari berbagai pengaruh dan tekanan, berikut distorsi terhadap prinsip Negara hukum dan prinsip pemisahan kekuasaan dalam konstitusi Timor Leste. Jika hipotesa dan asumsi ini

benar, maka bersiaplah untuk hidup di dalam sebuah Negara hukum retorik, Negara hukum yang tidak adil karena tidak sanggup memberikan keadilan kepada warganegara.

Untuk informasi selanjutnya hubungi:
Luis de Oliveira Sampaio
Alamat e-mail: luis@jsmp.minihub.org
Landline: 3323883